

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG APBD TERHADAP TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK, AKUNTABILITAS DAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK

Ratih Apriliandini Utina¹

¹ STIE Amkop Makassar

Email: apriandiniratih@gmail.com

Abstract: *This study aims to empirically prove hall knowledge about estimates of the financial supervision area (regional budget) that moderated the transparency of public policy, accountability and political party policy on the Board of the District Pangkep DPRD. The method used in this study is the method of the survey of 35 board members in District Pangkep. The whole population in this study serve as a sample with nonprobability sampling. The data used are primary data and analyzed using multiple linear regression statistical tests with SPSS version 17. After an analysis is carried out on the effect of the council's knowledge of the budget on regional financial supervision (APBD) with transparency of public policy, accountability and the interests of political parties as moderate variables, conclusions can be drawn, namely council knowledge, transparency of public policies, accountability and interests of political parties positively affect the board's knowledge of the budget with regional financial supervision (APBD) on DPRD institution in Pangkep Regency.*

Keywords: *Knowledge; Budgeting Oversight; Transparency; Accountability; The Importance of Political Parties.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengetahuan Dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan kebijakan partai politik pada DPRD Kabupaten Pangkep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei terhadap 35 anggota dewan di Kabupaten Pangkep. Seluruh populasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai sampel dengan pengambilan sampel nonprobabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dan dianalisis menggunakan uji statistik regresi linier berganda dengan SPSS versi 17. Setelah analisa dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan kepentingan partai politik sebagai variabel moderat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pengetahuan dewan, transparansi kebijakan public, akuntabilitas dan kepentingan partai politik berpengaruh positif terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada lembaga DPRD di Kabupaten Pangkep.

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

Kata Kunci: Pengetahuan; Pengawasan Anggaran; Transparansi; Akuntabilitas; Kepentingan Partai Politik.

1. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perencanaan keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pemerintah daerah melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah lalu disahkan dalam peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap daerah di Indonesia menjadi pedoman penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. Salah satu aturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran, dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Pelaksanakan fungsi anggaran, diharapkan lembaga legislatif memiliki sumber daya yang memahami tentang anggaran tersebut. Sesuai dengan Kepmen 13 Tahun 2006, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, PP 24 Tahun 2005, PP 58 Tahun 2005 merupakan suatu peraturan yang baru dimana manajemen keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang berbeda dari pengelolaan keuangan daerah di era sebelum reformasi.

Fungsi dewan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga legislatif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan oleh pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan mengingat secara umum anggota dewan berasal dari partai politik ataukah lebih

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

disebabkan karena permasalahan lain. Selain itu, apakah akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan kepentingan partai politik akan mempengaruhi hubungan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Sehubungan dengan fungsi anggota dewan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan, permasalahan yang akan menjadi fokus utama yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan (DPRD) perlu dilakukan untuk menyeimbangkan dengan kinerja pemerintah dalam hal penyusunan APBD, tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap pemberian kekuasaan dan wewenang yang luas terhadap pemerintah maka perlu dilakukan pengawasan serta control yang kuat sehingga dalam pengelolaannya dapat mencapai hasil yang maksimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepaiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya (Mardiasmo, 2002). Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Sutamoto, 2002, Sopanah, 2003). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

2.2. Pengawasan Keuangan Daerah

Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU No. 32 Tahun 2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

kebijakan bukan pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

2.3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi (Krina, 2003: 14) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut UNDP (Mardiasmo, 2009: 18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

2.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas (Krina, 2003 : 9) adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2009 : 18) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Domai (2002 : 54) Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

2.5. Kepentingan Partai Politik

Pengaruh politik ke dalam birokrasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Namun yang perlu dilakukan adalah bagaimana pengaruh tersebut cukup rasional dan terukur sehingga bermanfaat untuk mengembangkan sistem administrasi publik dan pelayanan umum yang baik, bukan justru sebaliknya (Halim, Abdul dan Iqbal, M. 2012 : 52). Berdasarkan uraian tersebut, bagi dewan merupakan keharusan untuk dapat memisahkan antara tugas mereka sebagai dewan dan kepentingan partai

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

politik mereka, mengingat begitu pentingnya peranannya dalam menjalankan kedudukan dan fungsi sebagai dewan.

Proses penyusunan hingga pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah selalu terdapat unsur kepentingan baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Kepentingan ada yang berbeda ada pula yang sama. Kepentingan legislatif bisa digolongkan menjadi dua, yakni kepentingan formal dan kepentingan informal. Kepentingan formal berupa hasil komitmen dari rapat internal badan anggaran dan informal berupa kepentingan partai pengusungnya dan konstituennya (Ramadhan: 2012).

3. METODE PENELITIAN

Populasi yang dijadikan penelitian yaitu anggota dewan di lembaga DPRD di Kabupaten Pangkep dengan jumlah anggota dewan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu semua anggota populasi menjadi responden. Alasan dipilihnya sampel tersebut karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan dan pengawasan terhadap anggaran dan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid dan tidak bias. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, teknik kuesioner dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi saat penelitian berlangsung. Melalui metode ini, operasional variabel-variabel penelitian dijabarkan kedalam indikator-indikator, kemudian diadakan pengukuran secara kualitatif sebagai dasar untuk uji hipotesis. Melalui penerapan metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang tepat dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

Ada tiga cara menguji regresi dengan variabel moderating yaitu uji interaksi, uji nilai selisih mutlak dan uji residual. Dalam penelitian ini menggunakan cara uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Sebelum itu akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat ketepatan suatu instrument yang akan diteliti serta melakukan uji asumsi klasik. Uji hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan uji t (parsial) yang memiliki fungsi untuk menguji masing-masing variabel tidak bebas dan uji f (simultan) berfungsi untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Untuk melihat interaksi variabel pengaruh pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan kepentingan partai politik. Dalam melakukan uji MRA terdapat perbandingan persamaan regresi sebagai berikut (Ghozali, Imam, 2002: 94):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_5 X_1 X_2 + e \dots\dots\dots (2)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \beta_6 X_1 X_3 + e \dots\dots\dots (3)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + e \dots\dots\dots (4)$$

1. Persamaan 1

Tabel 1. Coefficients Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.960	8.016		1.866	.071
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran_X1	.840	.264	.484	3.181	.003

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas maka hubungan yang terjadi dapat ditulis dalam bentuk persamaan model regresi yaitu:

$$Y = 14.960 + 0.840 X_1 + e$$

Dari persamaan regresi diatas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 14.960 menunjukkan nilai positif, jika variabel independen pengetahuan dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) diasumsikan nilainya konstan, maka nilai variabel dependen sebesar 14.960.

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

Kofisien regresi variabel (X1) sebesar 0,840 yang artinya (X1) memiliki nilai koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi Persamaan 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.484 ^a	.235	.212	3.30986

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Dari table diatas dapat terlihat bahwa nilai R² adalah 0.235 sehingga dapat dikatakan pengaruh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah 23,5% dengan nilai determinasi total tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (pengetahuan dewan tentang anggaran) mempunyai pengaruh yang lemah terhadap variabel Y (pengawasan dewan tentang anggaran (APBD)).

2. Persamaan 2

Tabel 3. Coefficients Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.868	6.969		3.425	.002
Pengetahuan dewan tentang anggaran_X1	.269	.349	.155	.769	.047
Transparansi kebijakan publik_X2	.220	.005	.018	4.059	.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas maka hubungan yang terjadi dapat ditulis dalam bentuk persamaan model regresi yaitu:

$$Y = 23,868 + 0,269X_1 + 0,220X_2 + 0,220X_1X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 23.868 menunjukkan nilai positif, jika variabel independen transparansi kebijakan publik terhadap antara pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) diasumsikan nilainya konstan, maka nilai variabel dependen sebesar 23.868.

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

Hasil perhitungan pada tabel 3 menunjukkan bahwa kedua variabel yang dimasukkan dalam regresi, variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memberikan nilai koefisien 0,269 dengan signifikan $0,047 < 0,05$, yang artinya berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan variabel transparansi kebijakan publik memberikan nilai koefisien 0,220 dengan signifikan $0,000 < 0,05$.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi Persamaan 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.484 ^a	.235	.212	3.30986

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai R^2 adalah 0.278 sehingga dapat dikatakan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah 27,8% dengan nilai determinasi total tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (transparansi kebijakan publik) mempunyai pengaruh yang lemah terhadap hubungan variabel X1 (pengetahuan dewan tentang anggaran) dengan variabel Y (pengawasan dewan tentang anggaran (APBD)).

3. Persamaan 3

Tabel 5. Coefficients Persamaan 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.129	7.828		1.933	.062
Pengetahuan_X1	.171	.329	.675	3.557	.001
Akuntabilitas_X3	.208	.005	.307	1.617	.016

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas maka hubungan yang terjadi dapat ditulis dalam bentuk persamaan model regresi yaitu:

$$Y = 15,129 + 0,171X1 + 0,208X3 + 0,208X1X3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 15.129 menunjukkan nilai positif, jika variabel independen akuntabilitas terhadap pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

**Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi
Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik**

(APBD) diasumsikan nilainya konstan, maka nilai variabel dependen sebesar 15.129.

Hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa kedua variabel yang dimasukkan dalam regresi, variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memberikan nilai koefisien 0,171 dengan signifikan $0,001 < 0,05$, yang artinya berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan variabel akuntabilitas memberikan nilai koefisien 0,208 dengan signifikan $0,016 < 0,05$.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi Persamaan 3

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.541 ^a	.293	.248	3.23178

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Dari table diatas dapat terlihat bahwa nilai R^2 adalah 0.293 sehingga dapat dikatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah 29,3% dengan nilai determinasi total tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (akuntabilitas) mempunyai pengaruh yang lemah terhadap hubungan variabel X1 (pengetahuan dewan tentang anggaran) dengan variabel Y (pengawasan dewan tentang anggaran (APBD)).

4. Persamaan 4

Tabel 7. Coefficients Persamaan 4

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.400	8.071		1.784	.084
Pengetahuan_X1	.693	.314	.400	2.207	.035
Kepentingan partai politik_X4	.405	.005	.158	.873	.009

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas maka hubungan yang terjadi dapat ditulis dalam bentuk persamaan model regresi yaitu:

$$Y = 14,400 + 0,693X1 + 0,405X4 + 0,405X1X4 + e$$

**Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi
Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik**

Dari persamaan regresi diatas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 14.400 menunjukkan nilai positif, jika variabel independen kepentingan partai politik terhadap pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) diasumsikan nilainya konstan, maka nilai variabel dependen sebesar 14.400.

Hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan bahwa kedua variabel yang dimasukkan dalam regresi, variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memberikan nilai koefisien 0.693 dengan signifikan $0,034 < 0,05$, yang artinya berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan variabel kepentingan partai politik memberikan nilai koefisien 0,405 dengan signifikan $0,009 < 0,05$.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi Persamaan 4

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.503 ^a	.253	.206	3.32186

Sumber: Hasil Olah Data SPSS. 2022

Dari table diatas dapat terlihat bahwa nilai R^2 adalah 0.253 sehingga dapat dikatakan kepentingan partai politik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah 25,3% dengan nilai determinasi total tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel X4 (kepentingan partai politik) mempunyai pengaruh yang lemah terhadap hubungan variabel X1 (pengetahuan dewan tentang anggaran) dengan variabel Y (pengawasan dewan tentang anggaran (APBD)).

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran adalah signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. (Yudono : 2002).

2. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Wahyudi (2007), judul penelitian "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah". Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. Terakhir, terdapat perbedaan signifikan antara fungsi pengawasan APBD menurut dewan dan masyarakat.

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah berpengaruh signifikan.

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong aparat untuk bekerja keras.

4. Pengaruh Kepentingan Partai Politik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kepentingan partai politik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepentingan partai politik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2012) yang menguji Pengaruh Kualitas Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Variabel Moderating yang menyebutkan bahwa kualitas anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Kualitas anggota dewan ditunjukkan dengan tingkat pendidikan formal dan non formal, pelatihan tentang keuangan dan anggaran daerah, pengalaman dalam bidang organisasi dan politik praktis serta pengalaman sebagai anggota dewan.

5. KESIMPULAN

Setelah analisa dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan kepentingan partai politik sebagai variabel moderat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pengetahuan dewan, transparansi kebijakan public, akuntabilitas dan kepentingan partai politik berpengaruh positif terhadap pengetahuan dewan tentang

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik

anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada Lembaga DPRD di Kabupaten Pangkep. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang diberikan pada penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dkk. 2002. *Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Alamsyah. 1997. Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Tesis S2 MAP. Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1978. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Domai, Tjahjanulin. 2002. *Reinventing Keungan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)*
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basir Economic*. 4th Edition. McGraw Hill International Edition, Singapore
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim. 2004. *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul dan Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Ichsan, dkk. 1997. *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan APB*. Brawijaya University Press, Malang.
- Indradi, Syamsiar. 2001. *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD terhadap Proses Pembujatan Peraturan Daerah*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya, Malang.
- Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas*.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan KinerjaPemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mayasari, R.P. 2012. *Pengaruh Kualitas Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Variabel Moderating*, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Universitas Tridinanti Palembang.
- Pramono, Agus H. 2002. *Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya, Malang.

**Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang APBD terhadap Transparansi
Kebijakan Publik, Akuntabilitas dan Kepentingan Partai Politik**

- Ramadhan, Alfian. 2012. Interaksi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pustaka Pergaulan Jakarta.
- Rubin, Irene. 1996. Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, Jurnal Public Budgeting & Finance, Summer.
- Sopannah. 2002. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Symposium Nasional Akuntansi V. Semarang.
- Sopannah dan Wahyudi. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Malang Corruption Watch (MCW). Malang.
- Suparmoko. 2002. Ekonomika Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi: Yogyakarta.
- Sutamoto, Tejo. 2002. Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai, Tesis S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Barawijaya, Malang.
- Syamsiar, Syamsudin. 2001. Hubungan Kualiatas Anggota DPRD terhadap partisipasi dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang, Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial Vol 13 No. 2, Malang.
- Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (DPRD), Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi. Pasca Sarhana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yudono, Bambang. 2002. Jurnal Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.